



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN DPR RI
2019



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kepada Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Kami dapat menyelesaikan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2019. Buku laporan ini disusun sebagai perwujudan dari akuntabilitas kelembagaan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Hal utama yang ingin disampaikan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah bagaimana Pusat Kajian Anggaran melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan (khusus bidang anggaran kepada DPR RI) agar dapat memperkuat kelembagaan Badan Keahlian DPR RI sebagai organisasi pemberi dukungan keahlian.

Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2019 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2019. Laporan Tahunan juga memaparkan berbagai permasalahan dan tantangan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan tata kelola Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI di masa mendatang khususnya Tahun anggaran 2020.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Pusat Kajian Anggaran

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I : PENDAHULUAN	6
A. Renstra Pusat Kajian Anggaran	6
B. Permasalahan	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	14
A. Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja 2019	14
B. Ringkasan/ikhtisar Output 2019	16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV : PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	35
A. Disiplin Pegawai	36
B. Peningkatan Kompetensi	38
BAB V : PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Rekomendasi	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Struktur Pusat Kajian Anggaran	7
Tabel 2.	Indikator Kinerja dan Target Kegiatan	8
Tabel 3.	Rencana Strategis Pusat Kajian Anggaran Tahun 2016-2019	10
Tabel 4.	Perbandingan Anggaran dan Pegawai	13
Tabel 5.	Target Kinerja	15
Tabel 6.	Perencanaan Kerja Output Pusat Kajian Anggaran 2019	17
Tabel 7.	SOP	18
Tabel 8.	Buletin Tahun 2019	19
Tabel 9.	Analisis Tahun 2019	22
Tabel 10.	Buku Tahun 2019	23
Tabel 11.	Referensi Tahun 2019	23
Tabel 12.	Jurnal Tahun 2019	24
Tabel 13.	Laporan Pengumpulan Data Tahun 2019	25
Tabel 14.	Analisis Ringkas Cepat (ARC) Tahun 2019	26
Tabel 15.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	29
Tabel 16.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2018 dan Realisasi 2019	30
Tabel 17.	Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Kinerja 2019	31
Tabel 18.	Realisasi Anggaran Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran Tahun Anggaran 2019	32
Tabel 19.	Realisasi Anggaran Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN Pusat Kajian Anggaran Tahun Anggaran 2019	33
Tabel 20.	Perbandingan Penyerapan DIPA TA. 2018, 2019	34
Tabel 21.	Sumber Daya Manusia Pusat Kajian Anggaran	35
Tabel 22.	Latar Belakang Pendidikan Analis PNS dan PPNASN	35
Tabel 23.	Tingkat Kedisiplinan	36
Tabel 24.	Jenis Cuti dan Izin Pegawai	38
Tabel 25.	Jenis Jabatan dan Latar Belakang Pendidikan	38

Tabel 26.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	39
Tabel 27.	Penggunaan ATK Pusat Kajian Anggaran Tahun 2019	39
Tabel 28.	Inventaris Kantor 2019	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Renstra Pusat Kajian Anggaran

Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sesuai dengan Peraturan Sekjen tersebut, tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN, adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- f. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- g. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- h. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 1

Struktur Pusat Kajian Anggaran



Dalam rangka mewujudkan kelembagaan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang akuntabel, Pusat Kajian Anggaran dituntut memiliki visi dan misi yang terangkum dalam suatu dokumen perencanaan. Untuk itu, Pusat Kajian Anggaran menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kajian Anggaran 2016-2019. Renstra yang disusun oleh Pusat Kajian Anggaran merupakan pertama kali dikarenakan Pusat Kajian Anggaran terbentuk pada 1 Oktober 2015.

Hal utama yang ingin dicapai dalam Renstra Pusat Kajian Anggaran 2016-2019 dalam konteks perencanaan adalah bagaimana Pusat Kajian Anggaran merencanakan program dukungan keahlian bidang anggaran kepada DPR RI guna memperkuat kelembagaan Badan Keahlian DPR RI sebagai organisasi pemberi dukungan keahlian melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya serta menjadikan Badan Keahlian DPR RI sebagai organisasi yang profesional, andal, dan akuntabel.

Selanjutnya dalam Renstra Pusat Kajian Anggaran disusun visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program/kegiatan serta *outcome/output*. Karena Pusat Kajian Anggaran adalah unit organisasi Eselon II, maka Pusat Kajian Anggaran mendukung pelaksanaan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Badan Keahlian DPR RI maka disusun Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran. Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran terbagi dalam dua sub kegiatan yaitu : Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran dan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN.

Indikator kinerja Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran untuk kurun waktu 2016-2019 ditetapkan pada tabel.2

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target Kegiatan

Tahun	Target	
	Jumlah Target Bahan Kebijakan	Jumlah Target Analisis/Referensi/Laporan APBN
2016	4	50
2017	3	50
2018	3	50
2019	5	50

Untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran, selama kurun waktu 2016-2019 Pusat Kajian Anggaran memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp 21.796.289.150. Selanjutnya bagaimana penjabaran dari visi sampai outcome/output yang tertuang dalam Renstra Pusat Kajian Anggaran 2016-2019 disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Rencana Strategis Pusat Kajian Anggaran Tahun 2016-2019

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan dan Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Komponen Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator
Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, dan akuntabel				Memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan	11	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	Terwujudnya dukungan keahlian di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan dan wewenang dan tugas DPR RI	Persentase tersedianya kajian/analisis/referensi/laporan di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan serta isu-isu terkait kedewanan
	Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan	Tercapainya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.	Penyediaan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada DPR RI yang tepat waktu	Peningkatan kualitas dan kuantitas analisis APBN yang didukung dengan penyediaan jabatan fungsional analis APBN yang cukup. Selain itu, harus diimbangi dengan pengembangan kompetensi dan kapasitas keahlian analis anggaran yang mumpuni	5798	Penyusunan Kajian Anggaran	Analisis/referensi/laporan APBN	Jumlah Analisis/referensi/laporan APBN
Menjadi Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI				Peningkatan kualitas produk analisis dan karya tulis ilmiah serta materi diklat APBN melalui penyediaan dan pengembangan kompetensi Analis APBN	5798	Penyusunan Kajian Anggaran	Analisis/referensi/laporan APBN	Jumlah Analisis/referensi/laporan APBN

bidang keahlian anggaran yang profesional, andal dan akuntabel				yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang didukung dengan penyusunan instrumen pembinaan jabatan fungsional Analisis APBN						
		a. Terwujudnya tatakelola dukungan kajian anggaran yang baik	1) Pengelolaan dukungan kajian anggaran yang baik.	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	051	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
	1. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan	b. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang membentuk arah politik anggaran Dewan	2) Penyediaan produk Kajian APBN yang tepat waktu.	Penyusunan Analisis, Referensi dan Analisis Ringkas Cepat APBN	Penyusunan Analisis, Referensi dan Analisis Ringkas Cepat APBN	052	Penyusunan dan Pengembangan analisis/referensi / laporan APBN	Penyusunan analisis/referensi / laporan APBN	Analisis/referensi/ laporan APBN	Jumlah Analisis/ referensi/ laporan APBN
						A		Penyusunan analisis/referensi / laporan APBN	Analisis/referensi/ laporan APBN	Jumlah Analisis/ referensi/ laporan APBN
						1		Penyusunan Analisis APBN	Analisis APBN	Jumlah Analisis APBN
						2		Penyusunan Referensi	Referensi	Jumlah Referensi
						3		Penerbitan Buletin APBN/ARC	ARC	Jumlah ARC
	2. Memperkuat manajemen pengetahuan	c. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran	3) Penyediaan produk karya tulis ilmiah dan	Penerbitan karya tulis ilmiah dan pengetahuan APBN	Penerbitan karya tulis ilmiah dan pengetahuan APBN	B		Penerbitan Jurnal/buku	Jurnal/Buku	Jumlah Buku
						1		Penerbitan Jurnal	Jurnal	Jumlah Jurnal

		yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan	pengetahuan APBN		2		Penerbitan Buku	Buku	Jumlah Buku
				Penyelenggaraan <i>database</i> APBN	C		Penyelenggaraan Database	Data dan Informasi	Jumlah Laporan
					1		Kegiatan Pengumpulan Data	Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi
	3. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN	d. Terwujudnya pengembangan Analis APBN yang profesional	4) Peletakan dasar-dasar profesionalitas jabatan Analis APBN	Pengembangan profesi Analis APBN	D		Pengembangan profesi Analis APBN	Bahan Pengembangan	Jumlah Bahan Pengembangan
					1		Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Workshop	Jumlah Laporan
					2		Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN	Bahan Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN	Jumlah Bahan Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi Pusat Kajian Anggaran antara lain :

1) Sumber Daya Manusia:

Jumlah Analis APBN Pusat Kajian Anggaran yang ideal sesuai dengan Analisa Beban Kerja adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang, sedangkan jumlah existing yang ada saat ini 39 (tiga puluh sembilan) Analis APBN. Jumlah tersebut diuraikan sebagai berikut Analis APBN 22 (dua puluh dua) orang dan Analis APBN PPNASN 17 (tujuh belas) orang, seharusnya Analis APBN seluruhnya diisi oleh Analis APBN.

2) Anggaran Pusat Kajian Anggran Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Perbandingan Anggaran dan Pegawai

No	Keterangan	2018	2019
1	Anggaran	5.258.830.000	5.258.830.000
2	Pegawai	44	44

Tahun 2018 dan 2019 Anggaran Pusat Kajian Anggaran tidak ada kenaikan, dan untuk jumlah pegawai tetap sama yaitu 44 (empat puluh empat) orang, akan tetapi terkait anggaran gaji PPNASN masih diambilkan dari DIPA Pusat Kajian Anggaran sehingga secara otomatis akan mengurangi kegiatan dari keseluruhan kegiatan Pusat Kajian Anggaran.

3) Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien harus didukung oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang memadai. Parameter yang dapat digunakan antara lain, proporsi jumlah SDM yang ada dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, beban tugas, dan *output* yang dihasilkan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat ini antara lain computer, *laptop* dan *printer berwarna*, termasuk didalamnya pemenuhan data untuk kepentingan *database*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2019

Tahun 2019 merupakan tahun ke-lima bagi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai organisasi baru hingga saat ini Pusat Kajian Anggaran masih perlu melakukan pembenahan, karena di satu sisi harus menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan keahlian kepada DPR RI secara optimal tetapi di sisi lain harus terus menata kelembagaannya agar dapat mencapai visinya, **“Menjadi Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal dan akuntabel.”**

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sebagai bagian dari proses pencapaian akuntabilitas kinerja maka Pusat Kajian Anggaran perlu menyusun rencana kerja sebagai panduan arah kebijakan, strategi, dan target yang akan dicapai tahun 2019 serta kebutuhan penganggarnya.

Rencana kerja disusun sebagai bagian dari proses kesinambungan perencanaan strategis Pusat Kajian Anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pusat Kajian Anggaran 2016-2019. Selanjutnya dalam Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran akan dijelaskan Arah Kebijakan, Strategi, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja.

Selanjutnya tema yang diangkat dalam rencana kerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2019 adalah konsolidasi Produk Analisis APBN. Dukungan kajian anggaran yang dilakukan harus menghasilkan kajian-kajian APBN yang mampu memberikan rekomendasi bagi DPR RI dalam memperbaiki sisi alokasi, distribusi dan stabilisasi APBN. Selanjutnya DPR RI dapat memanfaatkan hasil-hasil analisis APBN tersebut dalam menjalankan fungsi anggarannya.

Output dari Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran untuk tahun 2019 adalah analisis/referensi/laporan APBN. Adapun indikator kinerja diukur melalui : Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran dan jumlah analisis/referensi/laporan APBN, target kinerja Pusat Kajian Anggaran dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Target Kinerja

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	2019
Indikator Kinerja	Target
Satker Setjen	
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Perjanjian Kinerja (PK) 5 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Rencana Kegiatan	1
Rencana Keuangan	1
Laporan Pertanggungjawaban	1
Laporan Kinerja	1
Laporan Tim	1
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	5
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	
Perjanjian Kinerja (PK) 50 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	
Jurnal	2
Buletin APBN/ ARC	24
Buku Terkait APBN	5
Analisis Disesuaikan Siklus	14
Referensi	5
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	50
Non Perjanjian Kinerja (PK)	
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	14
Laporan Pengembangan Profesi	2
Laporan Workshop	3
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	19
TOTAL DOKUMEN PKA	75

Adapun target dari masing-masing indikator tersebut adalah:

1. Target kinerja utama (*cascading*) dari Bahan Kebijakan ditetapkan sebanyak 5 (lima) laporan, yaitu ; Rencana Kegiatan, Rencana Keuangan, laporan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja dan Laporan Tim.
2. Target kinerja utama (*cascading*) dari Target Analisis/ Referensi/ Laporan APBN adalah sebanyak 50 produk yang terdiri dari Jurnal, buletin APBN/ARC, Buku APBN, analisis, APBN, referensi, sementara untuk target kinerja tambahan (*noncascading*) ditetapkan 19 *output* yang terdiri dari penyelenggaraan *database*, pengembangan kompetensi dan pengembangan profesi Analis APBN.

B. Ringkasan/Ikhtisar Output 2019

Pada Tahun 2019 ditetapkan output perumusan kebijakan sebanyak 5 *output*. Dalam pelaksanaannya telah dihasilkan 5 *output* bahan kebijakan Pusat Kajian. Dengan demikian pencapaian adalah 100 persen. Adapun output yang dimaksudkan adalah: Rencana Kegiatan, Rencana Keuangan, laporan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja dan Laporan Tim. Untuk memudahkan pencapaian target maka untuk tahun 2019 disusun Perencanaan Kerja (Renja) *output* per bulannya. Adapun penjelasan target pencapaian *ouput* Pusat Kajian Anggaran disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Perencanaan Kerja *Output* Pusat Kajian Anggaran Tahun Anggaran 2019

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	2019	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Indikator Kinerja	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
Satker Setjen													
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran													
Perjanjian Kinerja (PK) 5 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran													
Rencana Kegiatan	1	1											
Rencana Keuangan	1	1											
Laporan Pertanggungjawaban	1											1	
Laporan Kinerja	1												1
Laporan Tim	1											1	
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	5	5											
Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)													
Indikator Kinerja	Target	Target											
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN													
Perjanjian Kinerja (PK) 50 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN													
Jurnal	2						1					1	
Buletin APBN/ ARC	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Buku Terkait APBN	5					3				1		1	
Analisis Disesuaikan Siklus	14				2	4		2	2	2		2	
Referensi	5									5			
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	50												
Non Perjanjian Kinerja (PK)													
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	14		1	3	2		1	2	2	1	1	1	
Laporan Pemodelan Ekonomi	-												
Laporan Pengembangan Profesi	2												
Laporan Workshop	3								1		2		
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	19												
TOTAL DOKUMEN PKA	75												

1) SOP Pusat Kajian Anggaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. SOP

NO	NAMA SOP
1	SOP Pemanggilan Pakar
2	SOP Penyusunan Analisis
3	SOP Penyusunan Referensi
4	SOP Penyusunan Analisis Ringkas Cepat/ARC
5	SOP Penerbitan Buletin APBN
6	SOP Penulisan Buku APBN
7	SOP Penerbitan Jurnal Budget
8	SOP Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri
9	SOP Pendampingan Ke Alat Kelengkapan Dewan
10	SOP Pendokumentasian Hasil Kerja
11	SOP Pengumpulan Data Dalam Kota/Pembelian Data
12	SOP Pengumpulan Data Ke Daerah
13	SOP Penyelenggaraan Workshop
14	SOP Rapat Internal
15	SOP Penggunaan Anggaran Jamuan
16	SOP Penggunaan Anggaran Narasumber
17	SOP Penggunaan Anggaran Pencetakan
18	SOP Penggunaan Anggaran SPPD
19	SOP Pertanggungjawaban Anggaran SPPD
20	SOP Surat Keluar
21	SOP Surat Masuk
22	SOP Usulan Anggaran

2) Laporan Akuntabilitas Kinerja 2019

Pada Tahun 2019 ditetapkan *output* utama Analisis sebanyak 50 *output*. Dalam pelaksanaannya telah dihasilkan 50 *output* Kajian sehingga pencapaian adalah 100 persen. Adapun *output* Penyusunan analisis/referensi/ laporan APBN yang terdiri dari :

1. Buletin sebanyak 24 :

Tabel 8
Buletin Tahun 2019

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Buletin APBN Edisi 1, Januari 2019	Saatnya Membenahi Neraca Perdagangan Indonesia
		Mendorong Peningkatan Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN
		Meningkatkan Kinerja Logistik Indonesia
2	Buletin APBN Edisi 2, Januari 2019	Cukai Plastik: Solusi Indonesia Darurat Sampah Plastik?
		Urgensi dan Kendala B20 di Indonesia
		Kemiskinan Turun, Apa Langkah Selanjutnya
3	Buletin APBN Edisi 3, Februari 2019	TOL Kendaraan Bermotor Roda Dua, Tepatkah diterapkan di Indonesia
		Penguatan BP Batam Sebagai Solusi Peningkatan Perekonomian Batam
		Solusi Segudang Persoalan Kartu Tani
4	Buletin APBN Edisi 4, Februari 2019	Peluang dan Tantangan dan Rencana Pembentukan Holding BUMN Infrastruktur
		Polemik Impor Jagung
		Potret Kinerja PNBPN SDA Kehutanan
5	Buletin APBN Edisi 5, Maret 2019	Problematika Tingginya Pengangguran Muda
		Tantangan dan Kendala Konversi DHE ke Rupiah
		Dana Abadi Penelitian Solusi Bagi Dunia Riset Indonesia
6	Buletin APBN Edisi 6, Maret 2019	Pengelolaan BMN: Obyek PNBPN yang Masih Terabaikan
		Tantangan Awal Penerapan Aeol
		Tantangan Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro (Umi)
7	Buletin APBN Edisi 7, April 2019	Harga gabah Anjlok: Tingkatkan Nilai Tambah Pertanian
		Tantangan Penerimaan PNBPN SDA Perikanan Tangkap
		Hambatan Implementasi OSS Dalam Memacu Investasi di Indonesia
8	Buletin APBN Edisi 8, April 2019	Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian
		Desa Digital: Potensi dan Tantangannya
		Peningkatan Kredit UMKM Melalui Rasio Intermediasi Makro Prudensial
9	Buletin APBN Edisi 9, Mei 2019	Delegated Act : Dampak dan Alternatif Kebijakan
		Potensi dan Tantangan Wisata Halal Indonesia
		Menakar Pemindahan Ibukota diluar Jawa

10	Buletin APBN Edisi 10, Mei 2019	Kebijakan Tak Tepat, Perbaikan Kinerja Neraca Dagang Terhambat
		Potensi Kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pertambangan Batubara
		Apakah Cukai BBM dapat Diaplikasikan di Indonesia
11	Buletin APBN Edisi 11, Juni 2019	Penguatan Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan Melalui Kemandirian Anggaran
		Bantuan Sosial ke Depan Ramah Terhadap Penyandang Disabilitas
		Kegalauan Pemerintah dalam Penerapan Pajak Pelaku e-Commerce
12	Buletin APBN Edisi 12, Juni 2019	Urgensi Insentif Pajak bagi Industri Pendukung Pendidikan Vokasi & Riset di Indonesia
		Mereview Kondisi Kelaparan Indonesia
		Menakar Kesiapan Indonesia Dalam Penerapan Sistem Zonasi PPDB
13	Buletin APBN Edisi 13, Juli 2019	Redistribusi Guru demi Pemerataan Guru
		Eksekusi dan Optimalkan Potensi Blok Masela
		Evaluasi Asuransi Usaha Tani Padi
14	Buletin APBN Edisi 14, Juli 2019	Menyikapi Temuan BPK Atas Kinerja Pelaksanaan Dana Desa
		Mengukur Kelebihan dan Kelemahan RUU Bea Materai
		Pengurangan Impor Limbah Plastik Melalui Pengembangan Industri Plastik <i>Biodegradable</i>
15	Buletin APBN Edisi 15 Agustus 2019	Tantangan Pelonggaran Moneter Dalam Mendukung Kinerja Neraca Perdagangan
		Menghadapi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi & <i>Shortfall</i> Penerimaan Pajak
		Penutupan Taman Nasional Komodo: Kerikil Bagi Sektor Pariwisata
16	Buletin APBN Edisi 16, Agustus 2019	Menakar Rencana Pemotongan tarif Pajak Penghasilan Badan
		Urgensi dan Tantangan Kartu Pra Kerja
		Mengevaluasi Kinerja Pemenuhan Kebutuhan Air Nasional Sebagai Prioritas Nasional
17	Buletin APBN Edisi 17 September 2019	Mampukah Pemerintah Mengejar Pajak Ekonomi Digital?
		Problematika Pelaksanaan Pendamping Lokal Desa
		Mengantisipasi Dampak Penghematan Subsidi Energi Pada Pertumbuhan Ekonomi
18	Buletin APBN Edisi 18 September 2019	Iuran BPJS Kesehatan Naik, Mengatasi Masalah Dengan Masalah
		Bea Masuk Impor untuk Melindungi Industri Pengolahan Susu
		Industri Baja Melemah Krakatau Steel Terus Merugi
19	Buletin APBN Edisi 19 Oktober 2019	Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik Jangan Diabaikan
		Revitalisasi IKM dan Tantangannya
		Dilema Simplikasi Cukai Rokok

20	Buletin APBN Edisi 20 Oktober 2019	Kesetaraan Gender di sector Pendidikan
		Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Tantangannya
		Infrastruktur Ketenagalistrikan Periode 2015-2019: Apakah Sudah Sesuai Target?
21	Buletin APBN Edisi 21 Nopember 2019	Koordinasi & Diplomasi Penting Bagi Industri Manufaktur Indonesia
		Review Asuransi Usaha Ternak Sapi
		Permasalahan dan Upaya Perbaikan Dana Insentif Daerah 2020
22	Buletin APBN Edisi 22 Nopember 2019	Sampah Jadi Listrik = Insentif
		Meninjau Pelaksanaan Program Pariwisata
		Evaluasi Kebijakan Pembiayaan dan Pelaksanaan Rumah Bersubsidi
23	Buletin APBN Edisi 23 Desember 2019	Kinerja Ekspor Indonesia Di Bawah Ancaman Resesi Global
		Polemik Pencabutan Azas Cabotage dalam Revisi UU Pelayaran
		Upaya Peningkatan Kapasitas SDM di Desa Melalui Akademi Desa 4.0
24	Buletin APBN Edisi 24 Desember 2019	Tantangan APBN 2020
		Menakar Kinerja Otoritas Pajak dalam Sengketa Pajak
		Urgensi Larangan ekspor Bijih Nikel dan Tantangannya

2. Analisis dan infografis sebanyak 14 :

Tabel 9
Analisis Tahun 2019

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Analisis dan Infografis No.01/an.PKA/PP/V/2019	Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital
2	Analisis dan Infografis No.02.PKA/PP/V/2019	DAK Sosial Sebagai Optimalisasi Program Bantuan Sosial
3	Analisis dan Infografis No.03/an.PKA/PP/V/2019	Program Pembangunan Fisik Bagi Masyarakat Miskin melalui Dana Desa
4	Analisis dan Infografis No.04/an.PKA/V/2019	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan BMN Untuk Penerimaan Negara Yang Lebih Baik
5	Analisis dan Infografis No.07/an.PKA/VII/2019	Tinjauan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018
6	Analisis dan Infografis No.08/an.PKA/VII/2019	Tinjauan Singkat atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018
7	Analisis dan Infografis No.09/an.PKA/VII/2019	Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2019 Anggaran Kesehatan Kementerian Kesehatan
8	Analisis dan Infografis No.10/an.PKA/VII/2019	Restitusi Pajak Meningkatkan Pemerintah Perlu Waspada
9	Analisis APBN dan Infografis No 12/PKA/APBN/VIII/2019	Penguatan Sistem Informasi Desa Dalam tata Kelola Dana Desa
10	Analisis APBN dan Infografis No 13/PKA/APBN/VIII/2019	Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Perbaikan Kualitas Guru Dan Redistribusi Guru
11	Analisis APBN dan Infografis No 14/PKA/APBN/VIII/2019	Upaya Meningkatkan Efektivitas Dana Kapitasi Sebagai Salah Satu Solusi Defisit BPJS Kesehatan
12	Analisis APBN dan Infografis No 15/PKA/APBN/VIII/2019	Meninjau Peran Dana Alokasi Khusus Afirmasi Transformasi Perdesaan
13	Analisis APBN dan Infografis No 15/PKA/LB/XII/2019	Investasi di daerah Dala Era Desentralisasi
14	Analisis APBN dan Infografis No 15/PKA/APBN/VIII/2019	Tinjauan Kritis Pengelolaan Balai Latihan Kerja

3. Buku sebanyak 5 :**Tabel 10**
Buku Tahun 2019

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Buku	Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Dalam RAPBN TA 2020
2	Buku	Tinjauan Kritis Atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan melalui APBN
3	Buku	Kajian Kritis Terhadap Isu-isu Strategis Pendapatan dan Pembiayaan Negara
4	Buku	Tinjauan Kritis anggaran Pendidikan melalui APBN
5	Buku	Dinamika Investasi, Tenaga Kerja dan Industri

4. Referensi sebanyak 5 :**Tabel 11**
Referensi Tahun 2019

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Referensi 05/ref.PKA/APBN/V/ 2019	Perkembangan Realisasi PNBPN Sumber Daya Alam
2	Referensi 05/ref.PKA/APBN/V/ 2019	Perkembangan Utang Pemerintah Pusat
3	Referensi 07/ref.PKA/LB/VIII/ 2019	Perkembangan Pembangunan Sarana Prasarana dan Indikator Kesehatan
4	Referensi 16/ref.PKA/LB/VIII/2019	Perkembangan dan Arah Kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK)
5	Referensi 17/ref.PKA/LB/VIII/2019	Indeks untuk Menggambarkan Hasil Pembangunan dari Pinggiran

5. Jurnal sebanyak 2 :

Tabel 12
Jurnal Tahun 2019

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Jurnal Volume 4 Edisi 1 (28 Juni 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh PAD, DAU, DAK, Penerimaan Pembiayaan dan Penanaman Modal Tetap Bruto Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Provinsi Kawasan Barat dan Timur Indonesia • Pengaruh Jarak ke Sekolah terhadap Angka Partisipasi dan Putus Sekolah SMP di Indonesia • Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Nilai Tukar Rupiah • Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi dan PDB terhadap Ekspor Tembaga di Indonesia • Potensi, Tantangan dan Dukungan Anggaran dalam Optimalisasi Lahan Rawa menjadi Sawah untuk Kedaulatan Pangan • Cukai Plastik untuk mengatasi Indonesia Darurat Sampah Plastik • Faktor Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
2	Jurnal Volume 4 Edisi 2 (28 Nopember 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Hubungan Tunjangan Profesional Guru dan Ujian Nasional • Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Inti Di Indonesia • Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Sebelum Dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa Di Tahun 2014 dan Tahun 2017 • Analisis Efektifitas Jalur Suku Bunga Dalam, Mekanisme Kebijakan Moneter Di Indonesia (Periode 2009-2018) • Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Perumahan dan Permukiman Pada Pemerintah Pusat • Pengaruh dan Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Indonesia • Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian Stunting di Indonesia • Pengaruh Belanja Pemerintah daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah • Analisis Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian dan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi • Dampak Penggunaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Terhadap Kesejahteraan Petani

6. Sementara untuk target kinerja tambahan (*noncascading*) ditetapkan 19 (sembilan belas) *output* yang terdiri dari penyelenggaraan *database*, pengembangan kompetensi dan pengembangan profesi Analis APBN. Sedangkan penyelenggaraan *database* berupa pengumpulan data lapangan ada 17 (tujuh belas) laporan dapat dilihat pada tabel 13 :

Tabel 13
Laporan Pengumpulan Data Tahun 2019

NO	KEGIATAN
1	Laporan Pengumpulan Data Ke Kabupaten Badung Provinsi Bali
2	Laporan Pengumpulan Data Ke Kabupaten Badung Provinsi Pekanbaru
3	Laporan Pengumpulan Data Ke Kota Serang Provinsi Banten
4	Laporan Pengumpulan Data Ke Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat
5	Laporan Pengumpulan Data Ke Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
6	Laporan Pengumpulan Data Ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
7	Laporan Pengumpulan Data Ke Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
8	Laporan Pengumpulan Data Ke Kota Malang Provinsi Jawa Timur
9	Laporan Pengumpulan Data Ke Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung
10	Laporan Pengumpulan Data Ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat
11	Laporan Pengumpulan Data Ke Kota Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
12	Laporan Pengumpulan Data Ke Kota Tanjung Pinang dan Batam Provinsi Kepulauan Riau
13	Laporan Pengumpulan Data Ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
14	Laporan Pengumpulan Data Ke Yogyakarta Provinsi DIY
15	Laporan Pengumpulan Data Ke Kabupaten Klungkung Bali
16	Laporan Pengumpulan Data Ke Bogor Jawa Barat
17	Laporan Pengumpulan Data Ke Kabupaten Tabanan Bali

7. Dalam kategori analisis juga dihasilkan Analisa Ringkas Cepat (ARC) yaitu analisis yang sifatnya pendek dan membutuhkan penyelesaian dalam waktu yang singkat, produk ini dibuat didasarkan pada permintaan. Jumlah Analisis Ringkas Cepat (ARC) selama tahun 2019 dihasilkan sebanyak 7 (tujuh) analisis dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14.
Analisis Ringkas Cepat (ARC) Tahun 2019

NO	Analisis Ringkas Cepat (ARC)	AKD
1	Analisis Ringkas Cepat tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan (<i>Endowment Fund</i>)	Komisi XI dan VI
2	Analisis Ringkas Cepat tentang Pembahasan PMN & Deviden BUMN : Kewenangan Siapa ?	Komisi VI
3	Analisis Ringkas Cepat tentang Kajian Anggaran di bidang Politik dan Keamanan	Korpolkam
4	Analisis Ringkas Cepat terkait isu-isu strategis fungsi anggaran	Komisi XI Badan Anggaran
5	Analisis Ringkas Cepat tentang Divestasi PT. Freeport Indonesia	Komisi VI
6	Analisis Ringkas Cepat tentang Permasalahan Dampak DAU Dinamis Terhadap APBD	Komisi II
7	Analisis Ringkas Cepat tentang Dana Desa dan Pajak Desa	Komisi II

8. Untuk pengembangan kompetensi berupa penyelenggaraan workshop telah dilakukan 3 (tiga) kali workshop dengan *output* yaitu :
- a. Laporan Workshop tentang "*Penguatan Sistem Informasi Desa Dalam tata Kelola Dana Desa*".
 - b. Laporan Workshop tentang "*Penguatan Arah Kebijakan Industri Indonesia dalam Memperbaiki Neraca Perdagangan*".
 - c. Laporan Workshop tentang "*Membangun Ekosistem Industri Guna Industri Manufaktur yang lebih baik*".

9. Untuk tahun 2019 studi banding ke luar negeri tidak dilakukan karena anggarannya dipusatkan di Badan Keahlian DPR RI.
10. Sementara untuk Pengembangan Instrumen Profesi Analis APBN Tahun 2019 telah disusun 2 (dua) rancangan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, yaitu:
 - a. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1/Sekjen/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
 - b. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2/Sekjen/2019 tentang Rincian Pelaksanaan Tugas, Standar Hasil Kerja dan Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analis APBN.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mendukung pelaksanaan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan, pada Tahun 2019 Pusat Kajian Anggaran menyusun berbagai rencana kegiatan yang dituangkan dalam Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran. Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran terbagi dalam dua sub kegiatan yaitu : Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran dan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut disajikan perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019, , perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan realisasi kinerja tahun 2019, Renstra 2016-2019 dengan realisasi 2019, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau meningkat/menurunnya serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan juga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel :

Tabel 15
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	Target 2019	Realisasi 2019
Indikator Kinerja		
Satker Setjen		
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
Perjanjian Kinerja (PK) 5 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
Rencana Kegiatan	1	1
Rencana Keuangan	1	1
Laporan Pertanggungjawaban	1	1
Laporan Kinerja	1	1
Laporan Tim	1	1
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	5	5
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN		
Jurnal	2	2
Buletin APBN/ ARC	24	24
Buku Terkait APBN	5	5
Analisis Disesuaikan Siklus	14	12
Referensi	5	7
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) 50 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	50	50
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	14	14
Laporan Pengembangan Profesi	2	2
Laporan Workshop	3	3
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	19	19
TOTAL DOKUMEN PKA	75	75

Target Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Kajian Anggaran tahun 2019 terealisasi 100 %, hal tersebut dikarenakan kegiatan berjalan sesuai perencanaan jika dilihat dari dokumen yang dibuat ada perubahan produk, yaitu produk analisis karena tidak ada siklus APBN Perubahan, sehingga produknya dialihkan ke referensi.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018 dan Realisasi 2019

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	Realisasi 2018	Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	Realisasi 2019
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja	
Satker Setjen		Satker Setjen	
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Perjanjian Kinerja (PK) 3 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		Perjanjian Kinerja (PK) 5 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Renstra	1	Rencana Kegiatan	1
Renja	1	Rencana Keuangan	1
LAKIP/Laporan Tahunan	1	Laporan Pertanggungjawaban	1
	-	Laporan Kinerja	1
	-	Laporan Tim	1
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	3	Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	5
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN		052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	
Jurnal	2	Jurnal	2
Buletin APBN/ ARC	24	Buletin APBN/ ARC	24
Buku Terkait APBN	5	Buku Terkait APBN	5
Analisis Disesuaikan Siklus	14	Analisis Disesuaikan Siklus	12
Referensi	5	Referensi	7
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) 50 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	50	Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) 50 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	50
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	6	Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	14
Laporan Pemodelan Ekonomi	-	Laporan Pemodelan Ekonomi	-
Laporan Pengembangan Profesi	3	Laporan Pengembangan Profesi	2
Laporan Workshop	3	Laporan Workshop	3
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	12	Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	19
TOTAL DOKUMEN PKA	65		75

Target Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Kajian Anggaran tahun 2018 dan 2019 terealisasi 100 %, hal tersebut dikarenakan kegiatan berjalan sesuai perencanaan jika

dilihat dari dokumen yang dibuat ada perubahan produk, yaitu produk analisis karena tidak ada siklus APBN Perubahan, sehingga produknya dialihkan ke referensi.

Tabel 17
Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Kinerja 2019

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	RENSTRA 2016-2019	Realisasi 2019
Indikator Kinerja		
Satker Setjen		
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
Perjanjian Kinerja (PK) 3 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
Renstra 2016-2019	1	1
Renja	1	1
LAKIP/Laporan Tahunan	1	1
Laporan Pertanggungjawaban	-	1
Laporan Tim	-	1
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	3	5
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN		
Jurnal	2	2
Buletin APBN/ ARC	24	24
Buku Terkait APBN	5	5
Analisis Disesuaikan Siklus	14	12
Referensi	5	7
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) 50 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	50	50
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	6	14
Laporan Pemodelan Ekonomi	1	-
Laporan Pengembangan Profesi	4	2
Laporan Workshop	3	3
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	14	19
TOTAL DOKUMEN PKA	67	75

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya/Analisis penggunaa sumber daya

Tahun 2019 terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp 34.084.450,-** hal ini disebabkan ada 1 (satu) orang Analis APBN Non Fungsiona/PPNASN yang mengundurkan diri terhitung bulan September 2019, sehingga terdapat sisa honorarium tim dikarenakan matrikulasi analis sehingga anggaran masih tersisa beberapa juta pada akhir tahun anggaran.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Salah satu program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah dilaksanakannya/diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan penerapan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) sehingga sangat menunjang setiap pelaksanaan program/kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran selama tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp5.258.830.000,- yang terdiri dari : Anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan sebesar Rp2.042.338.000,- dan Anggaran kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN sebesar Rp3.216.492.000,- Adapun realisasinya adalah sebesar Rp 5.224.745.000,- atau mencapai 99,35 persen rincian lebih lanjut dijelaskan pada sub-sub bagian berikut.

a. Realisasi Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan

Anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan dialokasikan sebesar Rp2.042.338.000,- tetapi dalam pelaksanaannya yang terealisasi sebesar Rp2.033.994.100,- dengan demikian penyerapannya adalah sebesar 99,59 persen. Adapun rincian dijelaskan dalam tabel 18.

Tabel 18
Realisasi Anggaran Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran Tahun Anggaran 2019

		Pagu	Realisasi
051	Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
A.	Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.188.000.000	1.182.000.000
521211	Belanja Bahan	291.338.000	291.323.000
521213	Honor Output Kegiatan	78.750.000	78.750.000
522151	Belanja Jasa Profesi	19.600.000	19.500.000
522191	Beban Jasa Lainnya	9.918.000	9.900.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	102.632.000	102.321.100
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000	2.100.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	350.000.000	348.100.000

b. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN

Anggaran kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN dialokasikan sebesar Rp3.216.492.000,- tetapi dalam pelaksanaannya yang terealisasi sebesar Rp3.190.751.450,- dengan demikian penyerapannya adalah sebesar 99.20 persen, adapun rincian dijelaskan dalam tabel 19.

Tabel 19
Realisasi Anggaran Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN Pusat Kajian Anggaran Tahun Anggaran 2019

		Pagu	Realisasi
052	Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN		
A.	Penyusunan Analisis/Referensi/Laporan APBN		
521211	Belanja Bahan	857.890.000	857.824.500
521213	Honor Output Kegiatan	169.950.000	165.050.000
522151	Belanja Jasa Profesi	102.900.000	102.200.000
B.	Penerbitan Karya Tulis Ilmiah dan Bahan Diklat APBN		
521211	Belanja Bahan	580.155.000	579.761.000
521213	Honor Output Kegiatan	169.150.000	158.650.000
522151	Belanja Jasa Profesi	111.300.000	109.800.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.00	2.250.000
C.	Penyelenggaraan Database		
521211	Belanja Bahan	20.700.000	20.700.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	628.050.000	627.584.000
522151	Belanja Jasa Profesi	9.800.000	8.300.000
536111	Belanja Modal Lainnya	6.330.000	3.560.350
D.	Pengembangan Profesi Analisis APBN		
521211	Belanja Bahan	109.413.000	109.389.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.742.000	5.075.000
521213	Honor Output Kegiatan	16.050.000	15.100.000
522151	Belanja Jasa Profesi	74.200.000	73.100.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	190.912.000	190.907.600
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	161.700.000	161.500.000

Tabel 20

Perbandingan Penyerapan DIPA TA. 2018 dan 2019

Keterangan	TA 2018	TA 2019
DIPA	Rp5.258.830.000,-	Rp . 5.258.830.000,-
Penyerapan	Rp4.193.119.950,-	Rp5.224.745.550,-
%	98,29 persen	99,35 persen

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya Manusia Pusat Kajian Anggaran 44 (empat puluh empat) orang, terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama 1 (satu) orang, Pengawas 1 (satu) orang, Pelaksana 3 (tiga) orang, Analis APBN 22 (dua puluh dua) orang dan 17 (tujuh belas) orang Pegawai Analis APBN Non Fungsional/Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara/PPNASN, adapun rincian jenis pegawai Pusat Kajian Anggaran dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Sumber Daya Manusia Pusat Kajian Anggaran

No	Jenis Jabatan	Jenis Pegawai	Total
1	Pejabat Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil	1
2	Pengawas	Pegawai Negeri Sipil	1
3	Pelaksana	Pegawai Negeri Sipil	3
4	Analis APBN	Pegawai Negeri Sipil	22
5	Analis APBN Non Fungsional (PPNASN)	Analis APBN Non Fungsional (PPNASN)	17
	Total	44	44

Tabel 22. Latar Belakang Pendidikan Analis PNS dan PPNASN

Jenis Jabatan	Pendidikan		Total
	S2	S1	
Analis APBN	9	13	22
Analis APBN Non Fungsional (PPNASN)	9	8	17

Dilihat dari jumlah Sumber Daya Manusia di Pusat Kajian Anggaran secara kuantitas belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan analisis APBN kepada Dewan sehingga harus ditambah. Saat ini jumlah Analis APBN sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, ini masih jauh dari jumlah ideal, dimana kebutuhan jumlah ideal Analis APBN untuk jangka panjang adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang. Tahun 2019 Pusat Kajian Anggaran menerima CPNS Analis APBN sebanyak 10 (sepuluh) orang, akan tetapi jika dilihat secara kuantitas jumlah Analis APBN masih kurang untuk itu diharapkan setiap tahun Pusat Kajian Anggaran mendapatkan CPNS Analis APBN.

A. Disiplin Pegawai

Disiplin pegawai dilihat dari ketidakhadiran tanpa alasan (alpa), dan bekerja tidak sesuai dengan jumlah kerja yang dilihat berdasarkan keterlambatan (TL=Terlambat) dan pulang lebih dulu (PSW=Pulang Sebelum Waktu). Selama periode Januari-Desember 2019, tidak ada pelanggaran.

Tabel 23. Tingkat Kedisiplinan

No	Nama Pegawai	Kedisiplinan
1	Dr Asep Ahmad Saefuloh,SE.,M.Si NIP. 197205162002121002	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
2	Husnul Latifah, S.Sos NIP. 19720718032002	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
3	Slamet Widodo, S.E., M.E. NIP. 196702181993021001	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
4	Dahiri, S.Si., M.Sc NIP. 198703232014021004	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
5	Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M NIP. 198506072014021001	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
6	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E. NIP. 198203042014021003	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
7	Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si. NIP. 198706302014022004	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
8	Ade Nurul Aida, S.E. NIP. 198702092014022003	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
9	Marihot Nasution, S.E., M.Si. NIP. 198410092014022001	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
10	Memed Sobari NIP. 196810091997031003	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
11	Musbiyatun NIP. 197011101997032006	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
12	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM. NIP. 198806212014022001	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
13	Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak. NIP. 198501032014022001	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
14	Hilda Piska Randini, S.IP NIP 199103162018012001	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
15	Rastri Paramita, S.E., M.M. NIP. 198001262014022002	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT KAJIAN ANGGARAN 2019

16	Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M. NIP. 198106012014022002	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
17	Rendy Alvaro,S.Sos NIP 198101032005021004	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
18	Damia Liana, S.E. NIP.199310142019032002	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
19	Deasy Dwi Ramiayu, S.E. NIP.199412022019032001	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
20	Ervita Luluk Zahara, S.E. NIP.199402032019032002	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
21	Mutiara Shinta Andini, S.E. NIP.199310232019032005	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
22	Nadya Ahda, S.E. NIP.199603082019032001	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
23	Riza Aditya Syafri, S. Ak. NIP.199411172019031001	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
24	Rosalina Tineke Kusumawardhani, SE NIP.198704082019032001	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
25	Satrio Arga Effendi, S.E. NIP.199406042019031001	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
26	Savitri Wulandari, S.E. NIP.199403112019032002	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
27	Tio Riyono, S.E. NIP.199501062019031002	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
28	Taufiq Hidayatulloh,SE	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
29	Ricka Wardianingsih,SE	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
30	Fransina Natalia M,SE	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
31	Mujiburrahman,SE	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
32	Hikmatul Fitri,SE.,M.Sc	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
33	Fadila Puti Lenggo Geni,SE,MM	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
34	Firly Nur Agustiani,SE,MM	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
35	Ollani Vabiola Bangun, S.IP.,MM	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
36	Dyah Maysarah, S.Hut	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
37	Matius Winarno, SE,MBA	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)

38	Emilia Octavia, ST.,M.Ak	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
39	Rahayuningsih, S.PD	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
40	Nurul Azizah, SE	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
41	Laras Lintang Asmoro, SE., MM	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
42	Iranisa, SE.,M.Acc	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
43	M. Rizal Firmansyah,SE	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)
44	Kahirina,SE	Alpa = 0 Jam (0 Hari) Total = 0 Jam (0 Hari)

Adapun penggunaan izin dan cuti sepanjang tahun 2019 dijelaskan dalam tabel 24.

Tabel 24. Jenis Cuti dan Izin Pegawai

No	Jenis Cuti dan Izin	Jumlah Pegawai	Rata- Rata
1	Cuti Melahirkan	1	3 bulan
2	Cuti Diluar Tanggungang Negara	1	2 tahun
3	Cuti Tahunan	18 (199 hari)	3 hari
4	Izin PSW (Pulang Sebelum Waktu)	10	1

B. Peningkatan Kompetensi

Dari pegawai 27 (dua puluh tujuh) orang dapat dirinci dari sisi akademis yaitu berijazah S-3 sebanyak 1 orang (5,56%), S-2 sebanyak 9 (sembilan) orang (61,11%), S-1 sebanyak 13 (tiga belas) orang (22,22%), dan SMU sebanyak 2 (dua) orang (11,11%). Dari komposisi tingkat pendidikan tersebut setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan potensinya masing-masing.

Tabel 25. Jenis Jabatan dan Latar Belakang Pendidikan

No	Jenis Jabatan	Pendidikan				Total
		S3	S2	S1	SMU	
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	-	-	-	1
2	Pengawas	-	-	1	-	1
3	Pelaksana	-	-	1	2	3
4	Analisis APBN	-	9	13	-	22
	Total	1	9	15	2	27

Untuk meningkatkan kompetensi, selama tahun 2019 Pusat Kajian Anggaran telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan berikut disampaikan jenis Pendidikan dan pelatihan.

Tabel 26. Jenis Pendidikan dan Pelatihan

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai
1	Pulic Speaking	1
2	LAKIP	1
3	Aplikasi Semar	2
4	Diklat Kepemimpinan	1

a. Pengelolaan ATK

Selama tahun 2019 ATK yang digunakan dijelaskan dalam tabel 27.

Tabel 27. Penggunaan ATK Pusat Kajian Anggaran Tahun 2019

No	Jenis ATK	Jumlah	Jumlah Sisa
1	Kertas A4	235 rim	10 rim
2	Kertas Folio	10 rim	8 rim
3	Pensil	58 buah	0
4	Flas Disk	23 buah	0
5	DVD	20 buah	10 buah
6	Lakban Hitam	6 buah	1
7	Double Tip	3 buah	0
8	Buku FL Bergaris	10 buah	0
9	Faster	36 buah	0
10	Tinta Tonner Cannon LBP 326A	18 buah	0
11	Tinta Toner Laser jet 1022	7 buah	1`buah
12	Cutter	13 buah	1 buah
13	Bypres	20 buah	0
14	Amplop Sekretariat Kecil	500 buah	0
15	Map Other	5 buah	0
16	Tip Ex	30 buah	4 buah
17	Solatip Kecil	5 buah	0
18	Paper Clip Kecil	20 dus	1 dus
19	Penghapus Pensil	10 buah	0
20	Box File	20 box	0
21	Clip Warna	30 dus	2 dus
22	Isi Steples Kecil	75 dus	13 dus
23	Otner	5 buah	0
24	Batu Batere Kecil A2	108 buah	2 buah
25	Batu Batere Kecil A3	84 buah	3 buah
26	Lem Kertas	20 buah	0
27	Tinta Epson T 143	8 buah	0
29	Pulpen Pilot	60 buah	0

30	Pulpen Boliner	30 buah	0
31	Blinder Clip	67 dus	7 dus
32	Map Diamon	500 buah	10 buah
33	Amplop Jaya 90	15 dus	5 dus
34	Amplop Sekretariat Besar	1700 lembar	60 Lembar
35	Toner Sharf AR 420	2 buah	0
36	Pita Mesin Tik Nakazima 830	12 buah	1 buah
37	Steples Kecil	15 buah	8 buah
38	Rautan Pensil	3 buah	0
39	Boxi BR	50 buah	2 buah

b. Pengelolaan Inventaris Kantor

Inventaris kantor yang dikelola tahun 2019 dijelaskan dalam tabel 28.

Tabel 28. Inventaris Kantor 2019

No	Jenis ATK	Jumlah
1	Televisi LG 43 inch	1
2	Televisi Samsung 39 inch	1
3	Televisi Sharf 32 inch	1
4	Mesin Photo Coppy	3
5	Laptop	2
6	Infokus Meja	1
7	Komputer Merk DELL	18
9	Printer Cannon	15
8	Printer Samsung	1
10	Printer HP laser jet 1022	2
11	Kopi Maker	2
12	Jam Dinding Merk Seiko	1
13	Burung Garuda	1
14	Loker	3
15	Lemari Es	1
16	Meja Kerja	7
17	Kursi Kerja	20
18	Kursi Tamu	2
19	Meja Rapat	2
20	Kalkulator Merk Citizen dan Casio	3
21	Mesin Fax	1
22	Dispenser	3
23	Penghancur Kertas	2
24	AC Split	6
25	Mesin Tik Elektrik	2
26	Fakta Integritas	1
27	Kamera	1
28	Alat Perekam	1

c. Pengelolaan Ruang Kerja

Ruang kerja yang nyaman menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh suatu unit kerja, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas. Salah satunya adalah Keterbatasan sarana dan prasarana kerja seperti laptop/komputer, mesin printer termasuk didalamnya pemenuhan data untuk kepentingan *database*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada aspek sumber daya manusia untuk jangka panjang secara keseluruhan masih kurang jumlah yang ideal berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) Analis APBN. Dengan jumlah yang ideal diharapkan pelayanan di bidang anggaran kepada Anggota Dewan dapat lebih maksimal, jumlah tersebut akan lebih ideal kalau tercukupi dengan Pegawai Negeri Sipil.
2. Pada aspek pendanaan dirasa masih kurang, karena dari setiap usulan yang diajukan tidak ada kenaikan, pada akhirnya kegiatan yang kita rencanakan tidak berjalan secara maksimal. Kekurangan pembiayaan dikhawatirkan akan mengurangi kualitas dari output Pusat Kajian Anggaran.
3. Pada aspek sarana dan prasarana kerja, permasalahan mendasar adalah kurangnya sarana kerja seperti computer/laptop dan printer untuk mendukung pelaksanaan tugas termasuk didalamnya pemenuhan akses data untuk kepentingan *database*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya dukungan dari Kepala Badan Keahlian Dewan dan Sekjen DPR RI dalam hal Penambahan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Diharapkan adanya dukungan dari Kepala Badan Keahlian Dewan dan Sekjen DPR RI dalam hal penambahan anggaran;
3. Diharapkan adanya dukungan dari Kepala Badan Keahlian Dewan dan Sekjen DPR RI sarana kerja seperti komputer/laptop dan mesin printer berwarna selain itu diperlukan juga akses data untuk keperluan Analis APBN.
4. Untuk meningkatkan Kompetensi Analis APBN, perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan ToT dan ToF.